

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAERAH
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009-2013**

**SIGIT INDRAWIJAYA *)
YENI EVRIANI **)**

***) Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
) Alumni Prodi Keuangan Daerah FEB UNJA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan daerah, menganalisis besarnya Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah, serta mengetahui Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo tahun 2009- 2013.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan penerimaan daerah menurut sumber penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013 terlihat rata-rata keseluruhan perkembangan penerimaan daerah sebesar 15,95%. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah kabupaten bungo semakin meningkat setiap tahun anggarannya dari tahun 2009-2013, Kontribusi dari masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013, dimana kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya adalah kontribusi yang berasal dari PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,04%, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten bungo masih belum mampu sepenuhnya untuk mengelolah sumber-sumber keuangannya dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Persentase tingkat kemandirian keuangan pendapatan asli daerah kabupaten bungo terhadap keuangan pemerintah pusat pada tahun 2009-2013 pada persentase antara 7,38% sampai dengan 8,55% yang mempunyai pola hubungan instruktif yang artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah karena masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Kata Kunci: Penerimaan Daerah, Kontribusi Penerimaan.

Latar Belakang

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan guna mensejajarkan dengan daerah lain. Berbagai upaya terus dilaksanakan daerah guna meminimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerja keras daerah terlihat dengan adanya berbagai terobosan dan potensi untuk menggali sumber dan potensi daerah, terutama penerimaan yang merupakan penerimaan yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdapat dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk mengelola perekonomian daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan salah satu rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005).

Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan otonomi dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :Pajak daerah

1. Retribusi daerah
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sangat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang telah diatur lebih lanjut pada undang-undang, berdasarkan prinsip transparansi telah menunjukkan dan memberikan perubahan serta penting sekali dalam membiayai pembangunan dalam era otonomi terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumberpendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang salah satunya berasal dari pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten diwilayah Barat Provinsi Jambi yang pada Tahun 2009 dimekarkan, sebagai Kabupaten induk penerimaan daerah Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun 2009 sebesar Rp. 520.412.279.564,53, dan pada tahun 2011 sebesar Rp.709.877.708.272,21. Sedangkan total penerimaan daerah pada t a h u n 2 0 1 3 s e b e s a r R p . 939.675.234.575,81. Tergambar dari tahun ke tahun penerimaan daerah di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kontribusi perkembangan penerimaan daerah itu terhadap total penerimaan daerah.

Penelitian tentang penerimaan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain seperti Aidayani (2013) yang meneliti di Kabupaten Sarolangun hasil penelitiannya bahwa kontribusi yang paling besar yaitu dari dana Perimbangan atau dari pemerintah pusat, berarti daerah Kabupaten Sarolangun masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Suryani (2012) yang meneliti di Kabupaten Sarolangun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dalam memberikan kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan secara berfluktuasi.

Demikian juga penelitian Wiwin Marlina (2013) yang meneliti di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Merangin yang semakin meningkat setiap tahun anggarannya. Penelitian ini pengacuan dari skripsi Wiwin Marlina yang membedakan tahun dan tempatnya, yang mana penelitiannya pada tahun 2007-2011 dan tempat penelitiannya di Kabupaten Merangin.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang seragam penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah Kabupaten Bungo dengan fenomena di atas hasilnya juga sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama perbedaan wilayah penelitian, penulis tertarik meneliti di Kabupaten Bungo yang semenjak awal otonomi daerah mengalami kemekaran wilayah, yang kedua tahun analisis juga berbeda, dimana dalam rentang jarak antara penelitian periode terdahulu yang dilakukan telah terjadi berbagai perubahan regulasi yang menyangkut pengeluaran keuangan daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau data yang sudah ada dan sudah tersedia dan diolah pihak ketiga secara berkala, untuk melihat penelitian selama waktu tertentu baik di buku-buku, literature maupun sumber lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) selama periode 2009-2013 yang terdiri dari :

1. Data penerimaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
2. Data penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
3. Data dana perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
4. Data lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo
2. Kantor BAPPEDA Kabupaten Bungo
3. DPPKAD Kabupaten Bungo

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik data

yang menganalisisnya dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang analisis penerimaan daerah di Kabupaten Bungo. Untuk menjawab tujuan pertama perkembangan penerimaan daerah dapat dilihat dengan menggunakan rumus :

$$\text{PPRD} = \frac{\text{PRD}_x - \text{PRD}_{x-1}}{\text{PRD}_{x-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PPRD: Perkembangan Penerimaan Daerah

PRD_x: Penerimaan Daerah Tahun Tertentu

PRD_{x-1}: Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu kontribusi sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Bungo di analisis dengan menggunakan rumus :

$$\text{KPD} = \frac{\text{SPD}}{\text{PD}} \times 100\%$$

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan rumus :

$$\text{TK} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Keterangan :

TK : Tingkat Kemandirian

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo

Kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya ditandai dengan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan keuangan daerah adalah salah satu faktor yang esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan daerahnya.

**Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

Tahun	Penerimaan Daerah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	520.412.279.564,53	
2010	620.682.985.437,70	19,26
2011	709.877.708.272,21	14,37
2012	793.972.772.126,72	11,84
2013	939.675.234.575,81	18,35
Rata-rata		15,95

Sumber: BPS Kabupaten Bungo

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan melihat posisi Keuangan Daerah. Posisi Keuangan Daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan perencanaan Keuangan Daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata perkembangan dengan presentase sebesar 15,95 %. Penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahun anggarannya, dimana perkembangan terendah terjadi pada Tahun 2012 dengan presentase 11.84 %, dan perkembangan tertinggi terjadi pada Tahun 2010 dengan presentase 19,26 %.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berikut ini adalah jumlah perkembangan PAD dari Tahun 2009-2013.

**Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	41.391.113.660,23	
2010	45.863.785.900,70	10,80
2011	60.708.028.070,85	32,36
2012	63.622.620.030,13	4,80
2013	78.393.003.526,86	23,21
Rata-rata		14,23

Sumber: BPS Kabupaten Bungo

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 dengan presentase sebesar 10,80 %. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan dari lain-lain pendapatan dan peningkatan retribusi daerah dari tahun 2009. Perkembangan PAD Kabupaten Bungo pada tahun 2011 mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 32,36 %, kemudian pada tahun 2012 jumlah pendapatan asli daerah menurun sebesar 4,80 % dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah pendapatan asli daerah dengan presentase sebesar 23,21 %. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya retribusi daerah Tahun 2011 sangat besar. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata presentase sebesar 14,23 %.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada Tahun 2012 sebesar 4,80 %, dan perkembangan tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 32,36 %, karena meningkatnya jumlah komponen dari pendapatan asli daerahnya.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dalam hal ini selalu mengalami peningkatan dan penurunan selama Tahun 2009-2013.

Tabel 3. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013

Tahun	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	415.139.261.658,00	
2010	473.509.789.946,00	14,06
2011	529.100.111.208,00	11,74
2012	626.894.343.250,00	18,48
2013	714.327.809.235,00	13,94
Rata-rata		11,64

Sumber: BPS Kabupaten Bungo

Perkembangan ini terjadi dari tahun 2009 dan pada tahun 2010 perkembangan dana perimbangan meningkat dengan presentase sebesar 14,06 %, besarnya angka peningkatan ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana alokasi umum. Pada tahun 2011 dana perimbangan mengalami penurunan yaitu sebesar 11,74 %, pada tahun 2012 perkembangan dana perimbangan meningkat kembali sebesar presentase 18,48 %, sedangkan perkembangan dana perimbangan pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 13,94 %.

Perkembangan dana perimbangan dari tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata perkembangan sebesar 11,64 %. Perkembangan dana perimbangan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 11,74 dan perkembangan tertinggi terjadi pada tahun

2012 sebesar 18,48 %.

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Kabupaten Bungo

Penerimaan daerah Kabupaten Bungo dalam sumber penerimaan lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari penerimaan dari provinsi, penerimaan dari Kabupaten dan Kota dan penerimaan lain-lain atau bantuan hibah mengalami perkembangan yang naik turun dari tahun 2009-2013.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.3 dibawah ini tentang perkembangan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Bungo tahun 2009-2013 :

Tabel 4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013

Tahun	Lain-lain yang sah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	63.881.904.246,30	
2010	570.819.199.537,00	793,55
2011	120.079.568.993,36	-78,96
2012	103.455.808.846,59	-13,84
2013	146.954.421.813,95	42,04
Rata-rata		148,55

Pada tahun 2010 perkembangan lain-lain pendapatan meningkat dengan persentase sebesar 793,55 %, pada tahun 2011 perkembangan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan yaitu sebesar -78,96 %, angka negative memberikan indikasi bahwa terjadi penurunan angka pada lain-lain pendapatan yang sah tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan persentase sebesar -13,84 % adapun yang menyebabkan menurunnya angka lain-lain penerimaan yang sah pada tahun 2012 disebabkan karena tidak adanya jumlah bantuan untuk pembangunan dan bantuan hibah. Pada tahun 2013 perkembangan pendapatan lain-lain yang sah meningkat kembali yaitu sebesar 42,04 %.

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mempunyai rata-rata perkembangan dengan angka persentase perkembangan sebesar 148,55 %. Perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar -13,84 % dikarenakan jumlah lain-lain pendapatan yang sah lebih kecil dari pada tahun 2011, dan perkembangan dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2010 % sebesar 793,55 %. Dengan rata-rata perkembangan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 148,55 %.

Kontribusi Sumber Penerimaan Daerah

Untuk dapat melihat seberapa besar sumbangan atau kontribusi dari masing-masing sumber penerimaan daerah di Kabupaten Bungo pada tahun anggaran

2009-2013 dengan menggunakan alat analisis kontribusi atau masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Bungo.

Tabel 5. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	41.391.113.660,23	520.412.279.564,53	7,95%
2010	45.863.785.900,70	620.682.985.437,70	7,38%
2011	60.708.028.070,85	709.877.708.272,21	8,55%
2012	63.622.620.030,13	793.972.772.126,72	8,01%
2013	78.393.003.526,86	939.675.234.575,81	8,34%
Rata-rata			8,05%

Sumber : BPS Kabupaten Bungo

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Kontribusi atau sumbangan dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo pada Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dan penurunan, pada 2009 kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo sebesar 7,95 %, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 7,38 %, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 8,55 %, pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan sebesar 8,01 %, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 8,34 %. Kontribusi pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,55 % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,38 %, dengan angka rata- rata kontribusi dari tahun 2009-2013 sebesar 8,05 %.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo masih mempunyai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum memberikan sumbangan yang belum berarti terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo.

Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Penerimaan Daerah

Dana Perimbangan yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat sangat dominan mempengaruhi jumlah penerimaan daerah keseluruhan yang terjadi pada penerimaan daerah Kabupaten Bungo. Kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah adalah sumbangan peranan dari dana perimbangan itu sendiri atas penerimaan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Bungo.

Dengan angka kontribusi atau sumbangan dana perimbangan sebesar 79,77 % pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2010 kontribusi dana perimbangan sedikit mengalami penurunan sebesar 76,28 %, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 74,5 3 %, sedangkan pada tahun 2012 meningkat kembali sebesar 78,95, dan pada tahun 2013 kontribusi dana perimbangan kembali menurun sebesar 76,0 1 %.

**Tabel 6. Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Penerimaan Daerah
Kabupaten Bungo 2009-2013**

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	415.139.261.658,00	520.412.279.564,53	79,77%
2010	473.509.789.946,00	620.682.985.437,70	76,28%
2011	529.100.111.208,00	709.877.708.272,21	74,53%
2012	626.894.343.250,00	793.972.772.126,72	78,95%
2013	714.327.809.235,00	939.675.234.575,81	76,01%
Rata-rata			77,11%

Sumber : BPS Kabupaten Bungo

Secara keseluruhan rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah pada tahun 2009-2013 meningkat dengan presentase sebesar 77,11 %. Melihat dari rata-rata kontribusi dana perimbangan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Bungo masih bergantung pada keuangan pemerintah pusat yang bersumber dari pembiayaan dana perimbangan.

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Pada kontribusi sumber penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,27 %, meningkat pada tahun 2010 sebesar 91,96 % kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 16,91 %, pada tahun 2012 menurun sebesar 13,03 % sedangkan pada tahun 2013 kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sedikit meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 15,63 %. Kontribusi sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan mengalami naik turun, angka kontribusi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 91,96 % dan angka kontribusi terendah pada tahun 2009 sebesar 12,27 %, serta mempunyai rata-rata angka kontribusi sebesar 29,96 %.

**Tabel 7. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Terhadap Penerimaan Daerah
Tahun 2009-2013**

Tahun	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	63.881.904.246,30	520.412.279.564,53	12,27%
2010	570.819.199.537,00	620.682.985.437,70	91,96%
2011	120.079.568.993,36	709.877.708.272,21	16,91%
2012	103.455.808.846,59	793.972.772.126,72	13,03%
2013	146.954.421.813,95	939.675.234.575,81	15,63%
Rata-rata			29,96%

Dilihat dari angka rata-rata kontribusi lain-lain penerimaan daerah yang sah sedikit memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah

Kabupaten Bungo karena selalu terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun-tahun tertentu dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

Tingkat Kemandirian Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo

Tingkat kemandirian kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan Kabupaten Bungo merupakan suatu alat pengukuran kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam mengelola semua pembiayaan yang dilakukan pemerintah yang dapat dilihat dari sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat dimana dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan pembangunan serta stabilitasi suatu daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah suatu pengukuran kemampuan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menimbulkan hubungan yang situasional setiap masing-masing daerah.

Pengukuran kemampuan keuangan otonomi daerah yang mandiri dapat menyebabkan besarnya sumbangan PAD dalam mempengaruhi penerimaan daerah secara keseluruhan. Sehingga akan dapat mencerminkan tingkat kemandirian yang akhirnya dapat menimbulkan pola hubungan keuangan daerah dengan keuangan pemerintah pusat yang berbedabeda.

Sumber pembiayaan yang berasal dari daerah yang berbentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pembiayaan yang sangat menunjang pelaksanaan sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, apabila penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat masih dominan dari pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan otonomi suatu daerah seutuhnya belum bisa dilaksanakan.

Tingkat kemandirian kemampuan PAD tahun 2010 menurun pada angka 7,38% yang berpola hubungan instruktif terhadap keuangan pemerintah pusat dimana daerah masih belum mampu melaksanakan otonominya dan daerah Kabupaten Bungo masih sangat bergantung dengan pembiayaan yang bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2012 tingkat kemandirian kemampuan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 8,55 % tetapi peningkatan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kemandirian kemampuan keuangan daerah otonomi dan masih terdapat pada pola hubungan yang instruktif. Tingkat kemandirian kemampuan keuangan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,01 % yang berpola hubungan instruktif, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,34 % dan masih terdapat pada pola hubungan yang instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, karena daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian kemampuan keuangan

pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 8. Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009-2013

No	Tahun	Kemandirian (%)	Keuangan	Pola Hubungan
1	2009	7,95	Rendah Sekali	Instruktif
2	2010	7,38	Rendah Sekali	Instruktif
3	2011	8,55	Rendah Sekali	Instruktif
4	2012	8,01	Rendah Sekali	Instruktif
5	2013	8,34	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : BPS Kabupaten Bungo

Dari tabel 5.3 diatas tersebut terlihat bahwa tingkat kemandirian kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo pada tahun 2009-2013 masih belum dapat melaksanakan pembiayaanotonominya karena masih mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat yang berbentuk dari dana perimbangan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil pembahasan pada bab bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkanhasil analisis perkembangan Penerimaan daerah menurut sumber penerimaan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013 terlihat rata-ratakeseluruhanperkembangan penerimaan daerah sebesar 15,95%. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bungo semakin meningkat setiap tahun anggarannya dari tahun 2009-2013.
2. Kontribusi dari masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013, dimana kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya adalah kontribusi yang berasal dari PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,04%, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo masih belum mampu sepenuhnya untuk mengelolah sumber-sumber keuangannya dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat.
3. Persentase tingkat kemandirian keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo terhadap Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2009-2013 pada persentase antara 7,38% sampai dengan 8,55% yang mempunyai pola hubungan instruktif yang artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah karena masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Saran

1. Suatu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bungo dapat menggunakan sumber penerimaan secara efektif dan efisien, sehingga pembiayaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi dalam penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah karena sumber penerimaan dari PAD akan dapat lebih membantu pertumbuhan pembangunan daerah tanpa harus dibantu dari sumber penerimaan dari Dana Perimbangan, dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bungo masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat.
3. Dalam upaya meningkatkan tingkat kemandirian kemampuan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih terarahkan untuk mengelola sumber PAD suatu daerah, karena dengan berkualitasnya SDM, maka pengelolaan PAD akan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo.

Daftar Pustaka

- Aidayani, (2013), "Analisis Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Sarolangun (2006-2010)", Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
- BPS Kabupaten Muara Bungo (2002), *Realisasi Penerimaan Daerah*, Kabupaten Muara Bungo.
- BPS Kabupaten Muara Bungo (2012), *Muara Bungo Dalam Angka*, Kabupaten Muara Bungo.
- Darise, Nurlan, dkk, (2009), "Pengelolaan Keuangan Daerah". PT. Indeks. Jakarta.
- Djumhana Muhamad, (2007), "Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundangundangan di bidang Keuangan Daerah". PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Halim, (2002), "Pengendalian Sumber Pajak dan Retribusi Daerah". Jakarta : Selemba Empat.
- Haris, (2005), "Analisa Penerimaan Daerah Di Kabupaten Sarolangun (2002- 2003)". Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA.
- Harsey dan Blanchard, (1989), "Konsep Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah", UI-Press Jakarta.
- Mamesah, (2004), "Sistem Administrasi Keuangan Daerah". Cetakan Pertama. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo, (2002), "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Marlina, Wiwin, (2013), "Analisis Penerimaan Daerah di Kabupaten Merangin (2007-2011)". Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.

- Parmadi, Rahmadi Selamat,(2010), "*Modul Keuangan Daerah* ".Universitas Jambi. Jambi.
- Pasal 29 Undang-undang No 22 Tahun (1999) "*dicantumkan sumber sumber pendapatan daerah* ".
Kabupaten Sarolangun (2007- 2011) ",Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
- Suparmoko,(2002),"*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* ", Grafindo Jakarta.
- Suparmoko,(2008),"*Pengertian Retribusi Daerah* ". Grafindo Jakarta.Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Pasal 1, Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Republik Indonesia,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 *Tentang Penggunaan Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).*
- Rulriyadi, (2008), *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun*, Skripsi FE- Universitas Jambi.
- Suherman,(2004),"*Perkembangan dan Struktur Pendapatan Daerah di Kota Jambi* ". Tesis tidak dipublikasikan MEP UNJA,Jambi.
- Suryani, (2012),"*Analisis Perkembangan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014."tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dan kewenangannya kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri".
- Warsito, dkk.(2008)."*Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah* ". UNDIP : Semarang.
- Widjaja,HAW,(2011), "*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* ",PT Rajagrafindo Persada.
- Yani, Ahmad, (2008), "*Pengertian Dan Devinisi Pajak Daerah* ", Jakarta.
- Yani,Ahmad. (2013),"*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*".PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.